

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

2.1.1.1 Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi. Standar Akuntansi Keuangan dapat diibaratkan sebagai cermin, dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi yang baik sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini (IAI, 2009).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam membuat laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan yang disingkat dengan SAK meliputi prosedur, peraturan, dan konvensi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Standar akuntansi nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB. Oleh karena itu, arah

penyusunan dan perkembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan mengacu pada standar akuntansi tersebut. Selain proses konvergensi, DSAK sedang menyusun standar akuntansi keuangan untuk usaha kecil dan menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar pelaku usaha di Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang tanggap dalam perkembangan, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1975 dan hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak pertama adalah, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994”. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi,

kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai kebutuhan.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

1. Pengakuan unsur laporan keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan, yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menjelaskan pos tersebut baik dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang, dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos memenuhi definisi suatu unsur yang diakui jika:

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

3. Pengukuran unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu.

4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan

2.1.1.2 Filosofi PSAK No. 50 dan No. 55 (revisi 2006)

Dalam rapat pada tanggal 30 Agustus 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan *Exposure Draft* PSAK 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi bisnis, dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat. Pada Bulan September 2006, DSAK mengeluarkan *Exposure Draft* PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dengan harapan mendapat tanggapan paling lambat tanggal 30 November 2006 (IAI, 2006).

Exposure Draft PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan merevisi PSAK 50 (1998): Akuntansi Investasi Efek Tertentu dan PSAK 55 (1999): Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. Kedua PSAK tersebut sebelumnya menggunakan referensi utama dari FASB *Statement of Standards* yaitu SFAS 115 *Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities* dan SFAS 133: *Accounting for Derivatives Instruments and Hedging Activities*. *Exposure Draft* PSAK 50 dan 55 (revisi

2006) tentang Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari IAS 32: *Financial Instruments: Disclosure and Presentation* dan IAS 39: *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Adopsi standar ini diperlukan untuk mendukung transaksi instrumen keuangan yang semakin kompleks dan pelaksanaan program konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Karena kebutuhan akan adopsi tersebut, maka Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia telah membentuk Tim Adopsi IAS 32 dan 39 dengan susunan sebagai berikut:

Tim Pengarah

Siti Ch. Fadjrijah	Bank Indonesia
Atjeng Sastrawidjaja	Ikatan Akuntan Indonesia
M. Jusuf Wibisana	Ikatan Akuntan Indonesia
Ahdi Jumhari Luddin	Bank Indonesia
SWD Murniastuti	Bank Indonesia
Boedi Armanto	Bank Indonesia

Tim Perumus

Agus Edy Siregar	Ikatan Akuntan Indonesia
Teguh Supangkat	Bank Indonesia
Hizbullah	Bank Indonesia
G. A. Indira	Bank Indonesia
Lestari Shitadewi	Bank Indonesia
Sri Yanita Dewi I	Bank Indonesia
Ferdinan D. Purba	Departemen Keuangan
Ety Retno Wulandari	Bapepam/Ikatan Akuntan Indonesia
Siddharta Utama	Ikatan Akuntan Indonesia
Sri Yanto Ikatan	Akuntan Indonesia
Gusmelinda Rahmi	Bapebti
Rachman Untung Budiman	Perusahaan Sekuritas
Fathor Rohman	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Hartati	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Muljono Tjandra	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Benny Hilman	Citibank
Minarni Hanli	PT. Bank Permata Tbk.
Diana Pradjono	Standard Chartered Bank
Adri Triwicahyo	PT. Rabo Bank Internasional
Rakhmat A. Santosa	Ikatan Akuntan Indonesia
Ridwan Nasution	Departemen Keuangan

Wening Cahyaningtyas	Ikatan Akuntan Indonesia
Nurwidodo Pristwanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Mansur	Ikatan Akuntan Indonesia
Iqbal Soenardi	Ikatan Akuntan Indonesia
Sri Winarni	PT. Bank Permata Tbk.
Yosika	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
R. Yulia Saptasari	Bank Indonesia
Nancy Lidya	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Denny Setiawan	Ikatan Akuntan Indonesia

Tim adopsi IAS 32 dan 39 melakukan tugasnya sejak 28 April 2005 dan telah menghasilkan Konsep *Exposure Draft* (KED) PSAK 50 (revisi 2006) tentang *Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan* dan Konsep *Exposure Draft* (KED) PSAK 55 (revisi 2006) tentang *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Penyusunan Konsep *Exposure Draft* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan internasional maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga telah melakukan pembahasan KED PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dalam beberapa kali pertemuan khusus.

Dalam rapat konsinyering DSAK tanggal 30 Agustus 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft* (ED) untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen. *Exposure draft* ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Media Akuntansi*, homepage IAI: www.iaiglobal.or.id, dan IAI-KAP: www.akuntanpublik.org.

Jakarta, 30 Agustus 2006
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agung Nugroho Soedibyo	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Gunadi	Anggota
Gudono	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Grahita Chandrarin	Anggota
Etty Retnowulandari	Anggota
Jumadi	Anggota

2.1.1.3 Revisi PSAK No. 50 dan No. 55 (revisi 2006) terhadap PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999)

Berikut ikhtisar ringkas mengenai revisi pengaturan dalam PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) terhadap PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam *Exposure Draft* (2006):

1. Sistematika penulisan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) disesuaikan dengan sistematika penulisan IAS 32 dan IAS 39. Perlakuan akuntansi diatur baik dalam paragraf-paragraf Pernyataan Standar maupun Panduan Aplikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernyataan Standar.
2. Substansi pengaturan dalam PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) tidak didasarkan pada “jenis instrumen” seperti pengaturan pada PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999), tetapi didasarkan pada “aspek perlakuan akuntansi” instrumen keuangan. Secara terinci perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PSAK 50 (1998) mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi pada efek tertentu tetapi tidak termasuk perlakuan akuntansi instrumen derivatif dari investasi efek tersebut. Sedangkan dari aspek perlakuan akuntansi yang diatur meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sementara itu, PSAK 50 (revisi 2006) mengatur aspek perlakuan akuntansi yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan untuk seluruh instrumen keuangan, termasuk instrumen derivatif.
 - b. PSAK 55 (1999) mengatur perlakuan akuntansi untuk instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai. Sedangkan dari aspek perlakuan akuntansi yang diatur meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sementara itu, PSAK 55 (revisi 2006) mengatur aspek perlakuan akuntansi yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran untuk instrumen keuangan, termasuk instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai.
3. Investasi pada efek tertentu dan instrumen derivatif yang diatur pada PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) merupakan bagian dari instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006). Selain itu, PSAK 50 (revisi 2006) memberikan definisi instrumen keuangan secara lebih jelas dan rinci. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan dan kewajiban keuangan entitas atau instrumen ekuitas entitas lain. Selanjutnya dalam PSAK 50 paragraf 7 diuraikan secara rinci, antara lain definisi dari aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas.

4. Pengklasifikasian instrumen keuangan harus dilakukan berdasarkan intensi yang kuat dan kemampuan manajemen untuk merealisasikan intensi tersebut. Pengklasifikasian instrumen keuangan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:
 - a. aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
 - b. investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo;
 - c. pinjaman yang diberikan dan piutang; dan
 - d. aset keuangan tersedia untuk dijual.
5. PSAK 55 (revisi 2006) mengatur konsep penghentian pengakuan (*derecognition*) aset keuangan. Penghentian pengakuan dilakukan oleh entitas jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau entitas mengalihkan (mentransfer) aset keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK ini. Pengalihan (transfer) aset keuangan dapat dibuktikan dengan memastikan apakah telah terjadi pengalihan risiko dan manfaat atas aset tersebut. Namun jika atas pengalihan aset tersebut sebenarnya secara substansial tidak terjadi pengalihan aset atau risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, maka entitas penghentian pengakuan dapat ditentukan dengan memastikan apakah entitas masih memiliki pengendalian (*control*) atas aset keuangan tersebut atau tidak.
6. Entitas tidak diperkenankan mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas hanya diperbolehkan untuk mereklasifikasi instrumen

keuangan dari investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kategori investasi keuangan tersedia untuk dijual jika terjadi perubahan intensi dan entitas tidak lagi memiliki kemampuan untuk merealisasikan intensi awalnya tersebut.

7. PSAK 55 (revisi 2006) memberikan opsi kepada entitas untuk menetapkan aset keuangan dan kewajiban keuangannya diukur dengan menggunakan nilai wajar (*fair value*) dan mengakui perubahan nilai wajarnya dalam laporan laba rugi pada awal perolehannya. PSAK ini juga memberikan panduan yang rinci mengenai karakteristik dan metode penentuan nilai wajar.
8. PSAK 55 (revisi 2006) juga menegaskan bahwa kerugian penurunan nilai aset keuangan diakui pada saat terjadinya untuk seluruh kategori instrumen keuangan. Panduan rinci mengenai pengakuan kerugian yang disebabkan karena penurunan nilai diatur dalam paragraph 64, 67, dan 68 dan Panduan Aplikasi yang terkait.
9. PSAK 55 (revisi 2006) juga mengatur perlakuan akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai seperti pada PSAK 55 (1999) dengan pengaturan dan panduan yang lebih rinci.

2.1.1.4 Pengertian PSAK No. 50 dan No. 55 (revisi 2006)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 (revisi 2006) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Desember 2006. PSAK 50 (revisi 2006) menggantikan PSAK No. 50 yang dikeluarkan oleh DSAK sejak tanggal 15 Juli 1998 dan PSAK 55 (revisi 2006)

menggantikan PSAK No. 55 yang dikeluarkan oleh DSAK sejak tanggal 10 September 1999.

PSAK 50 (revisi 2006) merupakan standar akuntansi yang mengacu kepada *International Accounting Standard (IAS) 32* mengenai *Presentation and Disclosures of Financial Instruments*. Pada saat penerbitan pernyataan ini, seluruh pengaturan dalam pernyataan ini sesuai dengan IAS 32 (revised 2005) untuk pengaturan perlakuan akuntansi mengenai penyajian instrumen keuangan, kecuali untuk hal-hal berikut:

1. Pengaturan perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan masih mengacu kepada IAS 32 (revised 2000) dan belum menggunakan IFRS 7 sebagai dasar acuan.
2. Ruang lingkup pernyataan ini tidak mengatur diperkenalkannya penerapan pernyataan ini untuk bagian partisipasi (penyertaan) dalam anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan pengendalian bersama entitas (*interest in jointly controlled entities*).
3. Pada ketentuan transisi penerapan pernyataan ini entitas harus menyajikan dan mengungkapkan dampak penyesuaian yang terjadi apabila entitas menyesuaikan perlakuan akuntansi instrumen keuangan yang dimilikinya sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan mengungkapkan bahwa ketentuan paragraf 8 dan 53 pernyataan ini tidak diterapkan atas penyesuaian yang dilakukan pada ketentuan transisi.

4. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan.
5. Pernyataan ini menggantikan ketentuan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang diatur dalam:
 - a. PSAK No. 50 (1998) tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu; dan
 - b. PSAK No. 55 (Revisi 1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

PSAK 55 (revisi 2006) merupakan standar akuntansi yang mengacu kepada IAS 39 mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instruments*. Pada saat penerbitan pernyataan ini, seluruh pengaturan dalam pernyataan ini sesuai dengan IAS 39 (revised 2005) untuk pengaturan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, kecuali untuk hal-hal berikut ini:

1. Ruang lingkup penerapan:
 - a. Pernyataan ini tidak diterapkan pada:
 - (i) penyertaan dalam rangka restrukturisasi kredit;
 - (ii) investasi yang dilakukan oleh dana pensiun kecuali mengenai pengukuran nilai wajar untuk investasi yang diukur pada nilai wajar.
 - b. Tidak mengatur diperkenankannya penerapan pernyataan ini untuk bagian partisipasi dalam pengendalian bersama entitas (*interest in jointly controlled entities*).

- c. Pernyataan ini diterapkan untuk investasi pada *investee* yang tidak memenuhi kriteria penggunaan metode ekuitas namun efek ekuitas tersebut memiliki nilai wajar.
2. Pada ketentuan transisi penerapan pernyataan ini, entitas dapat menyesuaikan perlakuan akuntansi instrumen keuangan yang dimilikinya sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan atas penyesuaian pada ketentuan transisi tersebut tidak berlaku ketentuan paragraf 8 dan 53 pernyataan ini.
3. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan.
4. Pernyataan ini menggantikan ketentuan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang diatur dalam:
 - a. PSAK No. 10 tentang *Transaksi dalam Mata Uang Asing*;
 - b. PSAK No. 28 (revisi 1996) tentang *Akuntansi Asuransi Kerugian*;
 - c. PSAK No. 31 (revisi 2000) tentang *Akuntansi Perbankan*;
 - d. PSAK No. 36 (revisi 1996) tentang *Akuntansi Asuransi Jiwa*;
 - e. PSAK No. 42 (1998) tentang *Akuntansi Perusahaan Efek*;
 - f. PSAK No. 43 (1997) tentang *Akuntansi Anjak Piutang*;
 - g. PSAK No. 50 (1998) tentang *Akuntansi Investasi Efek Tertentu*;
 - h. PSAK No. 55 (revisi 1999) tentang *Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai*.

2.1.1.5 Tujuan PSAK No. 50 dan No. 55 (revisi 2006)

PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2010 setelah ditunda dari 1 Januari 2009. Tujuan PSAK 50 (revisi 2006) menurut Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 (2007:50.1):

“Tujuan pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan kewajiban keuangan. Pernyataan ini berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan di mana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Prinsip-prinsip dalam pernyataan ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam PSAK 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.”

Penyajian adalah penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas (Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007, 2007:50.4). Pengungkapan adalah menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja dan arus kas ekuitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas masa depan yang terkait dengan instrumen tersebut (Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007, 2007:50.13).

Sedangkan tujuan PSAK 55 (revisi 2006) menurut Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007 (2007:55.1):

“Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan

kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan. Persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.”

Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (*reguler*)) (Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007, 2007:55.9). Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut (Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007, 2007:55.15).

2.1.1.6 Instrumen Keuangan

Menurut Kieso, *et al.*, (2008:207), instrumen keuangan (*financial instruments*) didefinisikan sebagai kas, kepentingan kepemilikan, atau hak kontraktual untuk menerima atau kewajiban untuk membayar kas atau instrumen keuangan lainnya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 (2007:50.3) dijelaskan bahwa instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.

1. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:

a. Kas

Menurut Kieso, *et al.*, yang dialihbahasakan oleh Emil Salim (2008:342), kas yaitu aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Pada umumnya, kas diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia pada deposito bank. Instrumen yang dapat dinegosiasi seperti pos wesel (*money order*), cek yang disahkan (*certified check*), cek kasir (*cashier check*), cek pribadi, dan wesel bank (*bank draft*) juga dipandang sebagai kas.

b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain

c. Hak kontraktual;

(i) Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain; atau

(ii) Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau

d. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:

(i) Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau

(ii) Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk

tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

2. Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa:

(a) Kewajiban kontraktual:

- (i) Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
- (ii) Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut.

(b) Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:

- (i) Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
- (ii) Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

3. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya.

2.1.1.7 Ciri-ciri PSAK No. 50 dan No. 55 (revisi 2006)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ditujukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dinilai memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

Menurut Dwi Martani dkk (2012:16):

“IFRS sebagai standar akuntansi internasional memiliki tiga ciri utama, antara lain:

1. *Principal Based*;
2. *Fair Value*;
3. *Full Disclosure*.”

Berikut penjelasan dari tiga ciri utama IFRS.

1. *Principal Based*; hanya mengatur hal-hal pokok yang bersifat prinsip dan bukan aturan detail. Standar ini mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sebagai konsekuensinya, diperlukan *professional judgement* yang tepat dalam menerapkan standar tersebut. Untuk dapat memiliki *professional judgement*, seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan etika.
2. *Fair Value*; penggunaan konsep nilai wajar yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi dalam pengambilan

keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini.

3. *Full Disclosure*; mengharuskan adanya pengungkapan yang lebih luas dalam suatu laporan keuangan. Tujuannya agar para pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui. Hal ini terkait dengan item yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting terkait dengan item tersebut untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.8 Manfaat Adopsi IFRS Terhadap PSAK No. 50 dan No. 55

Mengadopsi secara penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki standar sendiri dan menggunakan secara langsung IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetap melakukan proses penerjemahan IFRS ke dalam Bahasa Indonesia. DSAK juga melakukan analisis apakah IFRS dapat diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang ada. Jika diperlukan, DSAK akan membuat pengecualian penerapan IFRS atau sebaliknya menambah aturan dalam standar.

Mulai dari tanggal diterapkannya PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), Perusahaan harus melakukan klasifikasi atas aset dan kewajiban keuangan yang dimilikinya, dan perhitungan metode suku bunga efektif ketika aset atau kewajiban diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal PSAK ini ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan

awal PSAK ini sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut. Selain itu, PSAK ini juga mengubah cara Perusahaan dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi instrumen keuangan.

Secara umum, manfaat dari konvergensi IFRS ke PSAK 50 dan 55 (revisi 2005) adalah memudahkan pemahaman (*enhance comparability*) atas laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Dengan demikian, maka perusahaan dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang lebih berkualitas secara internasional (Ketut Tanti, 2012).

Jan Hoesada dalam Seminar dan Lokakarya “*IFRS for Today*” pada tanggal 6 sampai 7 Juni 2008 yang dikutip dari Nisa Istiqomah (2014) menyebutkan:

“Manfaat konvergensi Standar Akuntansi Internasional (IFRS) bagi Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan komparabilitas informasi keuangan yang berkualitas sehingga mengurangi biaya dana (*cost of capital*)
2. Menarik investasi lintas negara melalui transparansi
3. Mempermudah akses investasi dan pendanaan dengan skala internasional
4. Meningkatkan integrasi pasar modal secara global dan memudahkan *dual listing*
5. Memudahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan multinasional”

2.1.2 Relevansi Nilai Informasi Akuntansi

2.1.2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, dan diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dapat dikatakan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pimpinan perusahaan yang kemudian akan digunakan sebagai alat komunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. Pengertian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No. 1 Revisi 2012). Menurut Kieso, *et al.*, (2011a:5):

“Financial statements are the principal means through which financial information is communicated to those outside an enterprise. These statement provide the company’s history quatilied in money terms.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur yang disiapkan oleh manajemen entitas dalam mengkomunikasikan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan kepada pihak eksternal perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009 (2009:3):

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.”

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ini menilai apa yang telah

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009, 2009:3).

Sedangkan menurut Kieso, *et al.*, (2011a:7), *“The objective of general-purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and others creditors in making decisions in their capacity as capital providers.”*

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009 (2009:2):

“Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi Investor, Karyawan, Pemberi Jaminan, Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya, Pelanggan, Pemerintah, dan Masyarakat.”

1. Investor; merupakan pihak utama yang membutuhkan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor atau para pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
2. Karyawan; karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi jaminan; tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya; tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
5. Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah; pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat; perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi mengenai trend dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009, (2009:5):

“Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.”

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung, dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*)

berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory rule*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal, dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, suatu informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan

atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

4. Dapat diperbandingkan (*comparability*)

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh dari perubahan tersebut. Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar

akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Dari beberapa karakteristik yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini secara khusus membahas karakteristik kualitatif relevan (*relevance*) dari laporan keuangan.

2.1.2.2 Pengertian Relevansi Nilai Informasi Akuntansi

Menurut Warsono (2011), relevansi nilai (*value relevance*) merupakan satu dari dua karakteristik fundamental yang mendasari penyajian keuangan penuh-guna (*useful financial information*). Karakteristik ini disebut fundamental karena jika suatu laporan tidak memenuhi dua karakteristik fundamentalnya (*relevance* dan *faithful representation*), maka informasinya menjadi tidak berguna. Sedangkan Margani Pinasti (2004:740):

“Relevansi nilai adalah kemampuan menjelaskan (*explanatory power*) informasi akuntansi terhadap harga atau return saham. Relevansi nilai digunakan oleh investor untuk mengetahui kesesuaian nilai pada laporan keuangan perusahaan agar dapat membuat prediksi yang tepat atas harga atau return saham.”

Francis dan Schipper (1999) menyatakan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi adalah kemampuan angka-angka akuntansi untuk merangkum informasi yang mendasari harga saham, sehingga relevansi nilai diindikasikan dengan sebuah hubungan statistikal antara informasi keuangan dan harga/return saham. Pada dasarnya informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dihadapi. Informasi dapat mempunyai suatu

hubungan setidaknya dalam tiga cara, yaitu mempengaruhi tujuan, pemahaman, dan keputusan (Hendriksen dan Van Breda, 2000:142).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Juli 2009 (2009:5) menyatakan:

“Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.”

Pendapat yang sejalan juga dinyatakan oleh Kieso, *et al.*, (2008:37), yaitu bahwa agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan; yaitu memiliki nilai prediktif (*predictive value*). Informasi yang relevan juga membantu pemakai menjustifikasikan atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu; yaitu memiliki nilai umpan balik (*feedback value*) dan harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, atau dengan kata lain memiliki ketepatan waktu (*timeliness*).

Almia dan Sulistyowati (2007) menjelaskan bahwa penelitian mengenai relevansi nilai dirancang untuk menetapkan manfaat nilai-nilai akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan. Relevansi nilai merupakan pelaporan angka-angka akuntansi yang memiliki suatu model prediksi berkaitan dengan nilai-nilai pasar sekuritas. Angka-angka yang dimaksudkan adalah angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Konsep relevansi nilai tidak terlepas dari kriteria relevan dari standar akuntansi keuangan karena jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika jumlah yang disajikan merefleksikan informasi-informasi yang relevan dengan penilaian suatu perusahaan.

Menurut Francis dan Schipper (1999), ada empat interpretasi yang mungkin terhadap relevansi nilai, yaitu:

1. Informasi laporan keuangan mengarahkan laporan keuangan dengan cara menangkap nilai intrinsik saham yang merupakan alat pergerakan harga saham (*financial statement information leads stock prices by capturing intrinsic share values toward which stock prices drift*). Relevansi nilai kemudian akan diukur sebagai profit yang dihasilkan dari pelaksanaan peraturan *trading* berbasis akuntansi (*implementing accounting based trading rules*).
2. Informasi keuangan dikatakan relevan secara nilai apabila ia memuat variabel-variabel yang dimuat dalam model penilaian (*valuation model*) atau membantu dalam memprediksi variabel-variabel tersebut.
3. Asosiasi statistis mengukur apakah investor benar-benar menggunakan informasi laporan keuangan untuk membentuk harga (*investors actually use the information in question in setting prices*) sehingga relevansi nilai akan

diukur sebagai kemampuan informasi laporan keuangan untuk merubah bauran total informasi yang ada di pasar (*the ability of financial statements information to change the total mix of information in the marketplace*). Interpretasi ini menyiratkan bahwa relevansi nilai diukur sebagai “*news*”, mengimplikasikan bahwa informasi yang relevan secara nilai mampu mengubah harga saham karena ia menyebabkan investor merevisi ekspektasinya.

4. Suatu asosiasi secara statistis antara informasi akuntansi dengan nilai pasar atau *return*, khususnya dalam masa *window* yang panjang, bisa jadi berarti bahwa hanya informasi akuntansi yang sedang diteliti saja (*accounting information in question*) yang berkolerasi dengan informasi yang digunakan oleh investor. Dalam pandangan ini, relevansi nilai diukur oleh kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap atau merangkum informasi yang dapat mempengaruhi harga saham.

2.1.2.3 Pengukuran Relevansi Nilai

Informasi akuntansi memiliki relevansi nilai jika informasi tersebut mampu memprediksi atau mempengaruhi harga saham. Menurut penafsiran ini, relevansi nilai ditentukan dengan pengujian hubungan statistik dalam periode yang panjang. Jika hubungan statistik antara informasi akuntansi dan harga saham positif signifikan, maka informasi tersebut dikatakan relevan. Logikanya ialah akuntansi memberikan informasi yang merepresentasi kinerja perusahaan. Jika informasi akuntansi bermanfaat dan digunakan oleh investor sebagai dasar dalam

membuat keputusan, maka reaksi investor tersebut akan tercermin pada harga saham.

Relevansi nilai informasi akuntansi yang tinggi ditandai dengan adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan nilai buku ekuitas, karena kedua informasi akuntansi tersebut mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan (Barth *et al.*, 2008). Pendapat tersebut didukung oleh Subramanyan dan Wild (2012:92-93):

“Relevansi nilai informasi akuntansi digunakan untuk analisis dengan cara melihat sejauh mana angka akuntansi keuangan menjelaskan perubahan harga saham. Laba dan nilai buku (secara bersamaan) dapat menjelaskan 50% hingga 75% perilaku harga saham.”

Terdapat dua tipe model penilaian yang umumnya digunakan untuk menginvestigasi hubungan tersebut, yaitu model harga (*price model*) dan model return (*return model*). Kedua model tersebut diderivasi dari fondasi teoritis yang sama, yaitu yang dikenal sebagai model informasi linier (*linier information model*) yang dikembangkan oleh Ohlson tahun 1995 (Harry Andrian dan Sri Mulyani, 2007). Menurut Barth *et al.*, (2008):

“*Return model* adalah persamaan regresi yang menguji relevansi nilai informasi akuntansi melalui hubungan statistik antara *return* saham dengan laba dan perubahan laba. *Return model* biasanya digunakan untuk menguji kandungan informasi tepat pada saatnya (*in time basis*) dan cocok untuk studi pustaka (*event studies*), sehingga *return model* digolongkan ke dalam relevansi keputusan, bukan relevansi nilai.”

Sedangkan *price model* adalah sebuah persamaan regresi yang menguji relevansi nilai informasi akuntansi melalui hubungan statistik antara harga saham dengan laba dan nilai buku ekuitas.

Dari dua tipe model penilaian yang didasarkan kepada rerangka penilaian Ohlson (1995) tersebut, penelitian ini mengadopsi model harga sebagaimana yang juga digunakan oleh Barth *et al.* (2008). Ada tiga kesulitan yang diperkirakan akan ditemui dalam model return, yaitu (1) jika harga mengantisipasi variabel-variabel akuntansi sebagai variabel independen, perubahan harga untuk satu periode bisa berhubungan dengan variabel-variabel akuntansi pada periode berikutnya, (2) variabel-variabel penjelas yang relatif stabil dari satu periode ke periode berikutnya memiliki pengaruh yang kecil terhadap model meskipun variabel-variabel tersebut merupakan pemicu yang substantif atas nilai perusahaan, (3) penghitungan selisih atau perubahan pada variabel dependen dan independen dalam model return harus berasumsi bahwa variabel-variabel tersebut bisa dibandingkan (*comparable*) dari tahun ke tahun, akan tetapi perubahan praktik akuntansi dan komposisi sebuah perusahaan menentang asumsi ini. Penggunaan model harga dapat menghindari masalah-masalah tersebut di atas.

Pada umumnya, penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi menggunakan R^2 dari model harga dan atau model return sebagai pengukur relevansi nilai (Collins *et al.*, 1997; Francis dan Schipper, 1999). Hal ini disebabkan karena R^2 merupakan pengukur *explanatory power* dari variabel independen dalam suatu regresi linier. Jadi, secara intuitif, R^2 tampak merupakan pengukur yang baik dari relevansi nilai. Besar kecilnya nilai R^2 mencerminkan tinggi-rendahnya relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham (Andreas Lako, 2007).

Konsisten dengan penelitian Barth *et al.*, (2008) dan Chua *et al.*, (2012) sebelumnya, model penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model harga (*price model*) yang diperkenalkan oleh Ohlson (1995). Persamaan regresi relevansi nilai dengan model harga adalah sebagai berikut.

$$P_{it+1} = a_0 + b_1EPS_{it} + b_2BVPS_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

P_{it+1} = harga saham perusahaan i pada akhir bulan ketiga tahun t+1

EPS_{it} = laba bersih per lembar saham (*earnings per share*) perusahaan i tahun t

$BVPS_{it}$ = nilai buku ekuitas per lembar saham (*book value per share*) perusahaan i tahun t

a_0 = konstanta

e_{it} = *error term* perusahaan i tahun t

Berikut adalah penjelasan variabel yang terdapat dalam persamaan regresi model harga Ohlson (1995).

1. Laba Bersih Per Lembar Saham

Laba bersih (*net income*) merupakan representasi total pendapatan dikurangi beban atau hasil neto laba perusahaan selama satu periode (Kieso *et al.*, 2011a:148). Laba biasanya digunakan sebagai dasar dan ukuran kinerja saham dengan cara melihat laba per saham (*earning per share*) (Dwi Martani dkk, 2012:44). Laba per saham merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang beredar. Cara menghitung laba per saham adalah sebagai berikut.

$$EPS = \frac{\text{Net income} - \text{Preference Dividens}}{\text{Weighted Average Number of Shares Outstanding}}$$

(Kieso *et al.*, 2011b:839)

2. Nilai Buku Ekuitas Per Lembar Saham (*Book Value Per Share*)

Menurut Kieso *et al.*, (2011b:772):

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas dapat disebut sebagai *stakeholders' equity*, *shareholders' equity*, atau *corporate capital*. Ekuitas dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi model saham, agio saham, tambahan modal disetor, saldo laba, akumulasi pendapatan komperhensif lain, saham treasury, dan kepentingan non pengendali.

Nilai buku ekuitas per saham dapat digunakan untuk menilai tingkat pengembalian atas ekuitas, sehingga dapat memberikan pertimbangan bagi investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang (Brigham dan Houston, 2011:92). Nilai buku ekuitas per saham merupakan jumlah ekuitas bersih atas saham biasa per lembar saham yang beredar. Berikut proksi dari nilai buku ekuitas per saham.

$$BVPS = \frac{\text{Ordinary Shareholders' Equity}}{\text{Outstanding Shares}}$$

(Kieso *et al.*, 2011b:795)

3. Harga Saham (*Stock Price*)

Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Adapun harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan yang berakhir pada 31 Desember, bertepatan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan di BEI. Alasan pemilihan harga saham pada akhir Bulan Maret dikarenakan harga saham pada tanggal tersebut diasumsikan telah

menggambarkan informasi secara penuh laporan keuangan tahunan yang dibutuhkan oleh pasar (Margani Pinasti, 2004).

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan perbandingan *adjusted R²* antara periode sebelum dan periode setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Apabila *adjusted R²* periode sebelum < *adjusted R²* periode sesudah penerapan, maka kesimpulannya adalah terjadi kenaikan relevansi nilai laporan keuangan.

2.1.2.4 Kendala Relevansi Nilai

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Juli 2009 menyatakan:

“Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan informasi tidak relevan dan andal, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.”

2.1.3 Asimetri Informasi

2.1.3.1 Pengertian Asimetri Informasi

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul karena adanya suatu kontrak yang dilakukan oleh satu orang atau lebih *principal*, yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Manajer sebagai pihak pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik. Oleh karena itu, manajer wajib memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai Asimetri Informasi (Desmiyawati, 2009).

Asimetri Informasi adalah suatu situasi dimana manajer dalam suatu perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dari investor tentang operasi dan prospek masa yang akan datang (Ridwan S. Sudjaja, 2005:254). Menurut Regina Reizky Ifonie (2012):

“Asimetri Informasi adalah ketimpangan informasi antara manajer dengan pemegang saham, dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham atau *stakeholder* lainnya.”

Mamduh M. Hanafi (2008:217) mengatakan bahwa konsep signaling dan Asimetri Informasi berkaitan erat. Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama

mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Asimetri Informasi adalah suatu keadaan dimana manajemen perusahaan lebih mengetahui prospek atau kinerja perusahaan dibandingkan dengan investor.

2.1.3.2 Tipe Asimetri Informasi

Menurut Scott (2006:7), ada 2 tipe Asimetri Informasi, yaitu:

- a. *“Adverse selection*
Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantages over other parties.
- b. *Moral Hazard*
Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their action in fulfillment of the transaction but other parties cannot.”

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *adverse selection* adalah sebuah tipe Asimetri Informasi pada suatu transaksi bisnis atau transaksi potensial, dimana satu atau lebih dari satu pihak memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan pihak lain. *Moral hazard* adalah jenis Asimetri Informasi yang mana pihak pemegang saham atau pemberi pinjaman tidak dapat sepenuhnya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Hal ini menyebabkan manajer dapat melakukan tindakan yang dapat berdampak tidak baik bagi perusahaan dan pemegang saham.

2.1.3.3 Proksi Asimetri Informasi

Proksi yang Penulis gunakan dalam pengukuran Asimetri Informasi adalah *bid-ask spread*. Menurut Jogiyanto (2008:417):

Bid-ask spread adalah selisih harga beli terendah yang diajukan oleh pembeli dan harga jual tertinggi yang diminta oleh penjual.

Ni Ketut (2011) menyatakan bahwa *bid-ask spread* merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal dari:

- a. Pemilikan saham (*inventory holding*); biaya pemilikan saham menunjukkan *trade off* antara memiliki terlalu banyak saham dan memiliki terlalu sedikit saham. Atas biaya pemilikan saham tersebut akan menimbulkan *opportunity cost*.
- b. Pemrosesan pesanan (*order processing*); terdiri dari biaya administrasi, pelaporan proses komputer, telepon, dan lain-lain.
- c. Informasi asimetri; lahir karena adanya dua pihak *trader* yang tidak sama dalam memiliki dan mengakses informasi. Pihak pertama adalah *informed trader* yang memiliki informasi superior dan pihak lainnya adalah *uninformed trader* yang tidak memiliki informasi. Ketidakseimbangan informasi tersebut yang kemudian memunculkan perilaku *adverse selection* dan *moral hazard* dalam perdagangan saham antar *trader*. Jika kedua belah pihak bertransaksi, maka *uninformed trader* menghadapi resiko rugi. Upaya mengurangi resiko rugi tersebut tercermin dalam *bid-ask spread*.

Penelitian ini fokus pada fungsi ketiga yaitu Asimetri Informasi. *Bid-ask spread* merupakan salah satu ukuran dalam likuiditas pasar yang digunakan

sebagai pengukur Asimetri Informasi antara manajemen dengan pemegang saham perusahaan. Lev (1998) menyatakan bahwa *bid-ask spread* merupakan salah satu ukuran dalam likuiditas pasar yang digunakan sebagai pengukur Asimetri Informasi antara manajemen dengan pemegang saham perusahaan. *Bid-ask spread* dapat dijadikan sebagai proksi yang baik untuk melihat adanya Asimetri Informasi diantara pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal.

Penjelasan lebih lanjut mengenai *spreads* dikemukakan oleh Cohen dkk (1986:25) yang menekankan bahwa riset mengenai biaya transaksi (*immediacy cost*) harus membedakan antara *spread dealer* dan *spread pasar*. Ia menjelaskan bahwa *spread dealer* untuk suatu saham merupakan perbedaan harga *bid* dan *ask* yang ditentukan oleh *dealer* secara individual ketika transaksi saham tersebut dilaksanakan. Sedangkan *spread pasar* untuk suatu saham merupakan perbedaan harga *bid* tertinggi dan *ask* terendah diantara beberapa *dealer* yang sama-sama melakukan transaksi untuk saham tersebut. Di Bursa Efek Indonesia, *spread dealer* tidak dapat diobservasi karena *dealer* juga beroperasi ganda sebagai pialang (broker). Maka sebaiknya penelitian yang berkaitan dengan *bid-ask spread* menggunakan *spread pasar market (market spread)*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan *bid-ask spread* sebagai proksi dalam pengukuran Asimetri Informasi, yaitu sebagai berikut.

$$Spread_{i,t} = \frac{Ask_{i,t} - Bid_{i,t}}{\left(\frac{Ask_{i,t} + Bid_{i,t}}{2}\right)} \times 100$$

(Najah, 2003)

Dimana:

$Spread_{i,t}$ = selisih antara harga *ask* dan harga *bid* perusahaan i tahun t

$Ask_{i,t}$ = harga *ask* tertinggi saham perusahaan i tahun t

$Bid_{i,t}$ = harga *bid* terendah saham perusahaan i tahun t

Pengambilan data harga *ask* dan harga *bid* dilakukan untuk setiap perusahaan selama aperiode penelitian, kemudian diselisihkan sehingga didapat nilai *spread* yang dibutuhkan. Untuk menghitung perubahan harga saham yang diamati, perhitungan yang digunakan adalah perubahan harga saham tahun t (saat penelitian) dikurangi harga saham tahun sebelumnya (t-1) dibagi tahun sebelumnya (t-1). Berikut rumus untuk menghitung perubahan harga saham:

$$\Delta P = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

(Jogiyanto, 2008)

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam mendukung uraian di atas. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Healy (1999)	<i>Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increase in Disclosure</i>	Terjadi penurunan Asimetri Informasi setelah adopsi IFRS karena adanya peningkatan <i>disclosure</i> yang dapat

			menurunkan persentase <i>bid-ask spread</i>
2.	Leuz dan Verrecchia (2000)	<i>The Economic Consequences of Increased Disclosure</i>	Terjadi penurunan Asimetri Informasi setelah adopsi IFRS
3.	Barth, Mary E., Wayne R. Landsman., and Mark H. Lang (2008)	<i>International Accounting Standards and Accounting Quality</i>	IAS (PSAK) meningkatkan kualitas informasi akuntansi; ditandai dengan menurunnya manajemen laba, pengakuan kerugian dilakukan tepat waktu, dan meningkatnya relevansi nilai informasi akuntansi
4.	Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011)	<i>Mandatory Fair Value Accounting and Information Asymmetry: Evidence from the European Real Estate Industry</i>	Konvergensi IFRS berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya Asimetri Informasi.
5.	Chua, Yi Lin (Elaine)., et al (2012)	<i>The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality: Evidence from Australia</i>	Terjadi peningkatan <i>value relevance</i> setelah adopsi IFRS
6.	Aida Rohmah dan Retno Yuni (2013)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pasca Adopsi IFRS Terhadap Relevansi Nilai dan Asimetri Informasi	Terjadi peningkatan relevansi nilai sesudah penerapan SAK adopsi IFRS yang diikuti dengan penurunan Asimetri Informasi
7.	Viska Anggraita (2013)	Dampak Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) Tentang Instrumen Keuangan Terhadap	PSAK 50/55 (revisi 2006) meningkatkan relevansi nilai buku ekuitas, tetapi tidak

		Relevansi Nilai Komponen Dalam Laporan Posisi Keuangan: Studi Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	mempengaruhi relevansi nilai informasi <i>loan loss provision</i>
8.	Oktavia (2014)	Dampak dari Penerapan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006) Terhadap <i>Forward Earnings Response Coefficient</i> (FERC) dan Relevansi Nilai dari Derivatif Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) berhasil meningkatkan relevansi nilai dan transparansi dari derivatif keuangan

2.2 Kerangka Pemikiran

PSAK 50/55 (revisi 2006) memiliki dua karakteristik utama yang saling berkaitan, yaitu *fair value* dan *full disclosure*. Penerapan *fair value* diharapkan dapat meningkatkan relevansi nilai komponen dalam laporan keuangan dan kemudian akan mengurangi terjadinya Asimetri Informasi dengan diterapkannya *full disclosure*.

2.2.1 Dampak PSAK 50/55 (revisi 2006) Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi

PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan merupakan standar akuntansi keuangan Indonesia yang diadopsi dari IFRS. Penerapan IFRS yang memiliki karakteristik *principal-based standards* dan *fair value* dapat

meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi pada periode setelah adopsi IFRS (Barth *et al.*, 2008). Salah satunya dikarenakan PSAK 50/55 (revisi 2006) lebih banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*) yang lebih dapat menggambarkan posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berimplikasi pada keputusan investasi. Dasar pengukuran berbasis *fair value* lebih mencerminkan kondisi pasar sehingga memberikan informasi yang lebih tepat waktu, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat (Viska Anggraita, 2013). Selain itu, entitas juga diharuskan untuk melakukan pengungkapan lebih banyak agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan, serta kejadian penting terkait dengan item tersebut (Dwi Martini, dkk, 2012). Warsono (2011) menyebutkan sekitar 17 contoh standar dalam IFRS mensyaratkan pengukuran berbasis nilai wajar. Selanjutnya, banyaknya pengukuran yang didasarkan pada nilai wajar diharapkan dapat meningkatkan relevansi nilai dari laporan keuangan suatu perusahaan.

Penelitian terdahulu memberikan beberapa bukti bahwa IFRS (IAS 39 seperti juga PSAK 50/55 (revisi 2006)) sebagai *principles-based standards* lebih dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Hal ini terjadi karena pengukuran dengan *fair value* (nilai wajar) lebih dapat menggambarkan posisi dan kinerja ekonomik perusahaan, yang kemudian dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi (Barth *et al.*, 2008, Chua *et al.*, 2012).

Menurut Viska Anggraita (2013):

“Perubahan-perubahan dalam PSAK 50/55 (revisi 2006) dibandingkan dengan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan nilai wajar, antara lain:

1. Pengukuran pengakuan awal berdasarkan nilai wajar untuk semua item instrumen keuangan, dimana pada PSAK sebelumnya instrumen keuangan selain diperdagangkan, diukur dengan menggunakan biaya perolehan.
2. Adanya opsi untuk mengukur instrumen keuangan pada tanggal neraca menggunakan nilai wajar walaupun instrumen keuangan tersebut bukan untuk diperdagangkan (*fair value option*).
3. Ruang lingkup PSAK 50/55 (revisi 2006) lebih luas dibanding PSAK sebelumnya; misalnya untuk kredit yang diberikan yang sebelumnya tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK instrumen keuangan sekarang masuk sebagai instrumen keuangan.”

Dengan diwajibkannya perhitungan menggunakan nilai wajar untuk komponen dari laporan keuangan, maka akan membuat investor dapat menilai *value of the firm* secara lebih akurat, karena nilainya dianggap lebih relevan dengan nilai perusahaan yang sebenarnya. Implikasinya adalah harga yang terjadi di pasar mencerminkan *value of the firm* dengan tepat dan akan meningkatkan relevansi nilai laporan keuangan (Aida Rohman dan Retno Yuni, 2013). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akan terdapat perbedaan relevansi nilai informasi akuntansi sebelum dan setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).

2.2.2 Dampak PSAK 50/55 (revisi 2006) Terhadap Asimetri Informasi

Karakteristik utama lainnya dari IFRS atau PSAK 50/55 (revisi 2006) adalah *full disclosure* atau pengungkapan penuh. PSAK 50/55 (revisi 2006) mengharuskan pengungkapan yang lebih komperhensif (luas dan lengkap), terutama pengungkapan kuantitatif, terkait teknik penilaian instrumen keuangan dan manajemen resiko. Peningkatan pengungkapan ini bertujuan untuk membantu

para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jenis dan tingkat resiko yang timbul dari instrumen keuangan (Viska Anggraita, 2013).

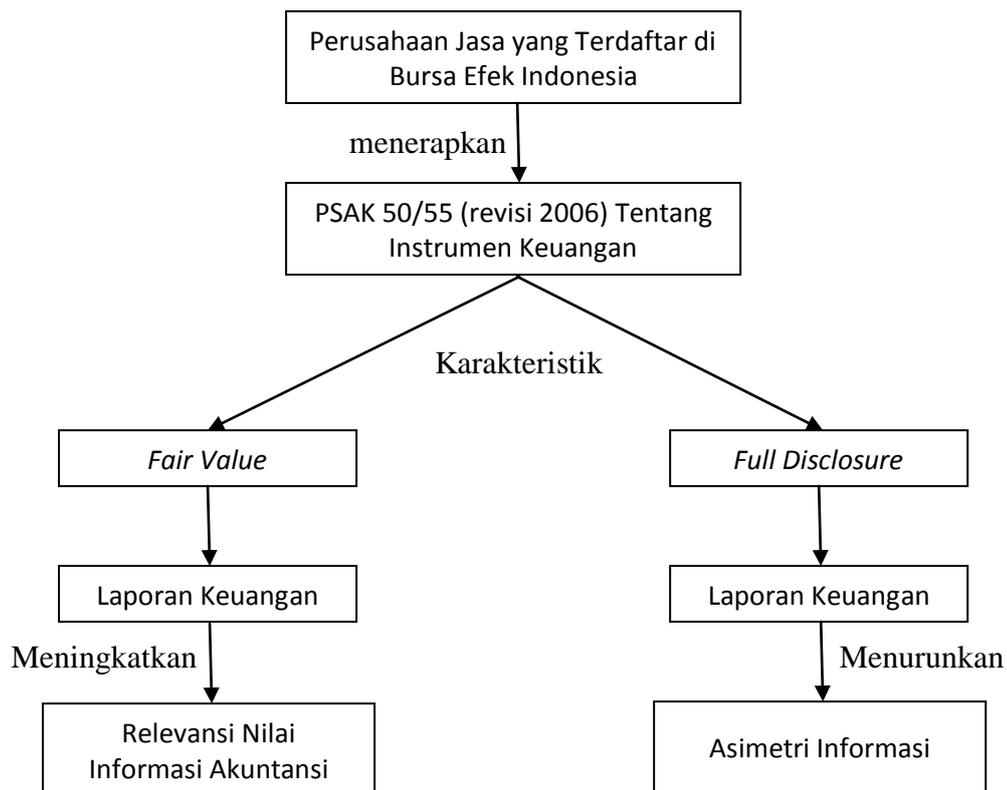
Aida Rohmah dan Retno Yuni (2013) menyatakan bahwa karakteristik *full disclosure* adalah persyaratan untuk mengungkapkan secara lebih banyak dan lebih rinci. Pengungkapan penuh sangat diperlukan bagi pembaca laporan keuangan agar dapat memahami isi dari laporan keuangan yang disajikan dengan lebih baik. Pengungkapan yang lebih luas juga akan mengarahkan investor untuk merevisi kembali penilaian mereka terhadap *value of the firm*. Selanjutnya akan berdampak pada menurunnya Asimetri Informasi antara *principal* (pemegang saham/investor) dan *agent* (manager).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa peningkatan pengungkapan (*disclosure*) akan berimplikasi pada penurunan Asimetri Informasi (Aida Rohmah dan Retno Yuni, 2013). Petreski (2005) dan Mary Bart (2007) mengatakan bahwa dengan adopsi standar internasional, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi dan manajemen laba yang semakin kecil. Dengan adanya standar akuntansi internasional yang lebih transparan, maka Asimetri Informasi yang ada menjadi lebih kecil.

Di pasar modal Indonesia, meskipun tidak signifikan, secara rata-rata terdapat penurunan Asimetri Informasi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi data yang tinggi pada tahun 2008, yang diakibatkan oleh adanya krisis moneter dan krisis bursa dunia (Caecilia Widi dan Rita Desniwat, 2012). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akan

terdapat perbedaan Asimetri Informasi sebelum dan setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) Indonesia.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:96):

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.”

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai analisis penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Asimetri Informasi. Berdasarkan literatur dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka Peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan.

H2: Terdapat perbedaan Asimetri Informasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan.